

# SIARAN PERS

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI BALI**



## **PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN BANGLI TA 2013**

**Denpasar, Rabu (11 Juni 2014)** – Memenuhi ketentuan undang-undang, bertempat di Ruang Rapat Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, BPK RI melaksanakan penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bangli Tahun Anggaran (TA) 2013.

LHP atas Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) bagian yang tidak terpisahkan yakni:

1. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2013 yang memuat opini;
2. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2013;
3. LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2013.

Dalam LHP yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bali BPK RI, Arman Syifa, kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangli, I Made Sudiasa, dan Bupati Bangli, I Made Gianyar, **BPK RI menyatakan opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2013.**

Opini tersebut diberikan mengacu pada Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa LHP yang akan diserahkan oleh BPK RI memuat opini atas Laporan keuangan. Opini yang diberikan oleh BPK RI didasarkan atas:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana pada rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak tertib yang berimplikasi tidak diyakininya pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp53,67 miliar.
2. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bangli belum tertib.

Beberapa kelemahan berupa temuan kepatuhan sebagai berikut:

1. Penerimaan kembali Dana Bergulir pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan sebesar Rp369,69 juta tidak melalui mekanisme pembiayaan daerah.
2. Dana klaim Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang masih berada dalam rekening JKBM dan rekening Jamkesmas/Jampersal RSUD Kabupaten Bangli digunakan langsung sebesar Rp194,91 juta.
3. Penerima Hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Hibah.

### **Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali**

Djatu Apriellia (Kasubbag Hukum dan Humas)

Telp : (0361) 229193

Fax : (0361) 229184, 256205

website : [www.denpasar.bpk.go.id](http://www.denpasar.bpk.go.id)

e-mail : [subbagianhukumdanhumasbali@yahoo.com](mailto:subbagianhukumdanhumasbali@yahoo.com)